

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
SISTEM JASA PENITIPAN HELM
(Studi di Area Parkir Simpur Center Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ilmu Syari'ah**

Oleh :

SALMA KHAIRANI

Npm. 1621030409

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
SISTEM JASA PENITIPAN HELM
(Studi di Area Parkir Simpur Center Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ilmu Syari'ah**

Oleh :

SALMA KHAIRANI

Npm. 1621030409

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Wadi'ah adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Menitipkan dan menerima titipan adalah (*wadi'ah*) adalah bagian aktivitas muamalah yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah penitipan helm di parkir Simpur Center Bandar Lampung. Namun permasalahan yang sering terjadi ialah petugas penjaga helm di Simpur Center Bandar Lampung kerap kali mengamankan helm pengunjung yang tergantung di kaca spion motor dan meletakkannya ke tempat penitipan helm tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik helm tersebut sehingga pengunjung yang memiliki helm tersebut membayar uang jasa penitipan helm kepada petugas penjaga penitipan helm, walaupun padahal sebenarnya pengunjung tersebut tidak berniat untuk menitipkan helmnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jasa penitipan helm di parkir Simpur center Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jasa penitipan helm di parkir Simpur Center Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem jasa penitipan helm di parkir Simpur Center Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasin dengan bantuan buku-buku yang ada pada perpustakaan. Pengumpulan data populasi dan sampel diperoleh dari petugas penjaga penitipan helm dan yang berjumlah 1 orang dan para pengunjung Simpur Center yang berjumlah 10 orang. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem jasa penitipan helm di parkir Simpur Center Bandar Lampung bahwa dalam praktiknya petugas parkir motor kerap kali mengamankan helm pengunjung dan meletakkannya di rak penitipan helm tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga pemilik helm tersebut harus membayar uang jasa penitipan helm walaupun sebenarnya pemilik helm tersebut tidak berniat untuk menitipkan helmnya. Dalam hukum Islam, praktik jasa penitipan helm pada Simpur Center ini hukumnya sesuai dengan hukum Islam, namun tindakan petugas penitipan helm yang mengamankan helm para pengunjung tanpa sepengetahuan pemiliknya tidak sesuai dengan tuntunan hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat dari akad *wadi'ah* yaitu *sighat* (perjanjian) antara kedua belah pihak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salma Khairani
NPM : 1621030409
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang di berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jasa Penitipan Helm (Studi Di Area Parkir Simpur Center Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada di penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2020

Penulis



NPM. 1621030409



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM JASA
PENITIPAN HELM (Studi di Area Parkir Simpur Center
Bandar Lampung)**
Nama : **SALMA KHAIRANI**
NPM : **1621030409**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

Pembimbing II

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
NIP. 196901051998031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM JASA PENITIPAN HELM (Studi di Area Parkir Simpur Center Bandar Lampung)”**. Disusun oleh Nama: **SALMA KHAIRANI** Npm: 1621030409, Program Studi: Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: **09 November 2020**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.

(.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

(.....)

Penguji Utama : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.

(.....)

Penguji Pendamping I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

(.....)

Penguji Pendamping II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

(.....)

**Dekan Fakultas Syari’ah
UIN Raden Intan Lampung**



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

’Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.’ –QS An-Nisa (58)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan rahmad dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta Saifudin dan Rasmiyati yang dengan sepenuh hati terus membimbing memberikan nasihat serta memberikan motivasi dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adikku tercinta M. Rafiqi Faith Gafar dan M. Arfan Hasif yang selalu memberikan semangat dan dukungan untukku dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Salma Khairani, putri pertama dari Bapak Saiudin dan Ibu Rasmiyati. Lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 12 April 1998

Riwayat Pendidikan :

1. Taman Kanak-Kanak Kartini Bandar Lampung pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2004
2. Sekolah Dasar Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bandar Lampung, pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2016
5. UIN Raden Intan Lampung, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah angkatan 2016.

KATA PENGANTAR

Assalam 'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari yaumul akhir kelak. Aamiin.

Adapun judul skripsi ini “Tinjaun Hukum Islam Tentang Sistem Jasa Penitipan Helm”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. oleh karena itu ucapan terimakasih yang sebesar besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba Ilmu di kampus tercinta ini.

2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa/I;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua jurusan Mu'amalah yang memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan, saran, membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku pembimbing II saya yang telah memberikan masukan, saran, membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Bapak/ibu dosen fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing juga seluruh staf kasubbag yang telah banyak membantu menyelesaikan tugas akhirku.
8. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2016, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah H angkatan 2016, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.

9. Saudara sepupuku dan sahabatku yang ku sayangi Syefi Mardhotillah, Rara Ardelia Artanti, Fadhillah Kholis, Rachmanda Amalia, Icha Febilia, Nurullia Utami, Faizati yasinta, Febriani Eka Safitri, Zamsalwa Azizah Salim, Okta Salsabila, Eka Permata Sari, Annisa Rizky, Tutty Ambarwati, Evinia, Feni Fitriani, Alike Indriyani, Healty Harsela.
10. Sahabat-sahabat dan keluarga besar KKN Desa Penantian, Kecamatan Ulubelu, Tanggamus kelompok 88 angkatan 2016 yang telah memberikan banyak pengalaman yang takkan terlupakan.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karna keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecualinya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, Oktober 2020
Penulis

Salma Khairani
NPM. 1621030409

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian	9

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	16
1. Konsep Umum Akad	16
a. Pengertian Akad	17
b. Dasar Hukum Akad.....	17
c. Rukun dan Syarat Akad	18
d. Macam-Macam Akad	24
e. Asas-Asas Akad	29
f. Hikmah Akad.....	32
g. Berakhirnya Akad	33
2. Konsep Umum Wadi'ah	35
a. Pengertian Wadi'ah	35
b. Dasar Hukum Wadi'ah	37
c. Rukun dan Syarat Wadi'ah.....	39
d. Macam Macam Wadi'ah.....	44
e. Kewajiban Menerima Wadi'ah.....	45
f. Cara Menjaga Barang Titipan.	47
g. Kondisi yang Membuat Titipan Harus Dijamin Gantinya.	50
h. Berakhirnya Akad Wadi'ah.....	55
B. Tinjauan Pustaka	56

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran umum lokasi penelitian59
- B. Praktik Sistem Jasa Penitipan Helm di Parkiran Simpur Center Bandar Lampung60

BAB IV : ANALISA PENELITIAN

- A. Praktik Sistem Jasa Penitipan Helm di Parkiran Simpur Center Bandar Lampung72
- B. Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Jasa Penitipan Helm di Parkiran Simpur Center Bandar Lampung.....74

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....79
- B. Rekomendasi.....80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak ada terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Pada sub-bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul penelitian ini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jasa Penitipan Helm (studi di Area Parkir Simpur Center Bandar Lampung).” Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan yaitu hasil maninjau; pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.² Hukum Islam adalah

¹Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1060.

²Amir Syafuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.³

3. Sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁴
4. Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya.⁵
5. Penitipan adalah penyerahan barang kepada seseorang yang dipercaya dengan syarat barang tersebut akan dikembalikan apabila tujuan penjaminan atas barang tersebut telah selesai dilaksanakan ; penyimpanan bertanggungjawab atas keamanan barang yang disimpankan tersebut.⁶
6. Helm adalah topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang tahan benturan (dipakai oleh tentara, anggota barisan pemadam kebakaran, pekerja tambang, penyelam sebagai bagian dari pakaian, pengendara sepeda motor, dan sebagainya).⁷Jadi yang dimaksud dari judul di atas adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem jasa penitipan helm di Simpung Center Bandar Lampung.

³Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), h.154.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.9.

⁵Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*...., h.563.

⁶*Ibid.* h. 867.

⁷*Ibid.* h. 384.

B. Alasan memilih judul

1. Alasan Objektif

Permasalahan didalam penelitian ini adalah merupakan salah satu masalah praktik muamalah yang tumbuh beredar luas yang berkembang didalam kehidupan masyarakat.

2. Alasan Subjektif

- a. Kesesuaian bidang yang diteliti dan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk melakukan penelitian;
- b. Judul tersebut sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis yaitu jurusan Muamalah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- c. Tempat penelitian terjangkau oleh penulis;
- d. Judul skripsi yang diambil belum ada yang pernah membahas dan menjadi tantangan tersendiri bagi penulis.

C. Latar Belakang Masalah

Aturan-aturan dalam muamalah diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Manusia dalam menjalankan hidupnya memerlukan keberadaan orang lain, sebab manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.⁸

Dengan adanya hubungan antar manusia, maka timbulah hak dan kewajiban yang merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 3.

kehidupan manusia. Sehingga Islam memberikan aturan muamalah yang mudah guna memberikan kesempatan perkembangan manusia di kemudian hari.

Peranan hukum islam dalam era modern ini sangat diperlukan dalam menjawab permasalahan yang timbul. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus bersifat fleksibel dan elastis untuk memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Akad adalah bagian dari macam-macam *tasharruf*, yang dimaksud dengan *tasharruf* ialah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya.⁹

Tasharruf terbagi dua, yaitu *tasharruf fi'il* dan *tasharruf qauli*: *Tasharruf fi'il* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan barang oranglain.

Tasharruf qauli ialah *tasharruf* yang keluar dari lidah manusia atau sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian.¹⁰

Perkataan '*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji

⁹ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, "*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*", (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 42.

¹⁰ *Ibid*, h. 43.

tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut (*'aqad*).¹¹

Dalam muamalah, akad itu menduduki posisi yang amat penting, karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah, dan yang akan mengikat hubungan itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang, dan karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan perjanjian, dijelaskan dalam perjanjian oleh keduanya, kecuali bila menghalalkan yang haram atau

Wadi'ah adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.¹² *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: 'Sungguh Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya'.¹³

¹¹*Ibid*, h. 45.

¹²Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 69.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), h. 60.

Di samping dalam Al-Qur'an, dasar hukum wa'diah juga terdapat dalam hadist Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّيَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: Tunaikanlah amanah pada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud dan ia menghasankannya, dan hadist ini juga dishahihkan oleh Hakim).¹⁴

Menitipkan dan menerima titipan adalah (*wadi'ah*) adalah bagian aktivitas muamalah yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya.¹⁵ Menerima titipan adalah suatu hal yang mulia dan dianjurkan oleh agama Islam, jika penerima mampu dan bisa bertanggungjawab.

Setiap tempat umum, khususnya tempat pusat perbelanjaan seperti Simpung Center Bandar Lampung pasti memiliki tempat parkir yang disediakan untuk pengunjung, di tempat parkir tersebut biasanya disediakan fasilitas penitipan helm. Lazimnya, pengunjung yang ingin mengamankan helmnya bisa menitipkan helmnya dengan kemauannya sendiri kepada petugas penjaga penitipan helm dan membayar uang jasa penitipan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

¹⁴Ibni Hajar Al-‘asqolaanii, *Buluughu al-maraam* (Jakarta: Daarul-kutub al-islamiyah, 2002), h. 225.

¹⁵Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h. 3.

Namun permasalahan yang sering terjadi ialah pada praktiknya selain pengunjung yang sengaja menitipkan helmnya ke tempat penitipan helm, petugas penjaga helm di Simpura Center Bandar Lampung kerap kali mengamankan helm pengunjung yang tergantung di kaca spion motor dan meletakkannya ke tempat penitipan helm tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik helm tersebut dengan alasan ingin meminimalisir terjadinya kehilangan sehingga pengunjung yang memiliki helm tersebut membayar uang jasa penitipan helm kepada petugas penjaga penitipan helm, walaupun padahal sebenarnya pengunjung tersebut tidak berniat untuk menitipkan helmnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mendorong penulis untuk lebih tahu mendalam dan meneliti tentang sistem jasa penitipan helm di Simpura Center Bandar Lampung.

D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu hanya berfokus tentang sistem jasa penitipan helm di parkir Simpura Center Bandar Lampung apakah sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat Islam atau tidak.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jasa penitipan helm di parkir Simpura Center Bandar Lampung?

2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap sistem jasa penitipan helm di parkiran Simpur Center Bandar Lampung?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat diatas dapat diambil tujuandan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem jasa penitipan helm di parkiran Simpur Center Bandar Lampung
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam tentang sistem jasa penitipan helm di parkiran Simpur Center Bandar Lampung
2. Manfaat penelitian
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas konsepsi maupun teori tentang penitipan dan menjadi informasi dan referensi dalam memahami secara mendalam tentang penitipan.
 - b. Secara praktis, penelitian ini bermaksud sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S. H pada fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem penitipan yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik penitipan yang sesuai dengan hukum islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini bermaksud sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.¹⁶ Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial.

¹⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h.54.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi.¹⁷ Pengertian deskriptif menitik beratkan pada observasi dan setting alamiah. Penelitian bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati segala dan mencatat dan tidak memanipulasi.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan status hukum dari praktik jasa penitipan helm di parkir Simpur Center Bandar Lampung, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁸ Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari petugas jasa penitipan helm dan pengunjung Simpur Center Bandar Lampung.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri,

¹⁷ Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

¹⁸ *Ibid*, h. 102.

walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. Dengan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula antar pencari informasi dan sumber informasi.²⁰ Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara. Dalam praktiknya, penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada petugas penjaga helm di Simpur Center Bandar Lampung.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²¹ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme sistem jasa penitipan helm di Simpur Center Bandar Lampung.

¹⁹ Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 104.

²⁰ *Ibid*, h. 121.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari dan mengetahui hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang²²

5. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi juga dapat di artikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian.²³ Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 101 orang yang terdiri dari 100 orang penitip helm yang dihitung rata-rata per hari dan 1 orang penjaga penitipan helm.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang di ambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karateristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.²⁴ Berdasarkan buku Dr. Suharsimi Arikunto yang menyebutkan apabila subyeknya kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua, jika subyeknya

²²*Ibid*, h. 125

²³Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h.

²⁴Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.

lebih dari 100 orang maka diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.²⁵ Oleh karena itu berdasarkan penentuan jumlah sampel yang dijelaskan, penulis mengambil sampel sebanyak 10% dari jumlah populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah $101 \times 10\% = 10.1$, dikenakan menjadi 10. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang. Terdiri dari 10 penitip helm dan 1 petugas penjaga penitipan helm. Sistem pengambilan sampel menggunakan *random sampling*. Sampel acak (*random sampling*) ialah suatu sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian dari suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.²⁶

6. Analisis data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan di analisis, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.²⁷ Dalam menganalisa data digunakan kerangka berfikir induktif.

Metode berfikir induktif,yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat pendapat dari

²⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*..., h. 80.

²⁶*Ibid*, h. 81.

²⁷Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 154.

perorangan kemudian dijadikan pendapat pengetahuannya bersifat umum.²⁸



²⁸*Ibid*, h.47.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Konsep Umum Akad

a. Pengertian Akad

Akad menurut etimologi (bahasa) mempunyai beberapa arti antara lain:

1) Mengikat

Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatnya salah satunya dengan yang lainnya sehingga bersambungan, kemudian keduanya menjadi sebagai potongan benda .

2) Janji

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran (3): 76:

﴿الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنْ وَاتَّقَىٰ بَعْدَهُ أَوْفَىٰ مَنْ بَلَىٰ﴾

Artinya: Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)Nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.(QS. Al-Imran (3): 76)²⁹

3) Istilah akad berasal dari bahasa arab yakni *Al-‘aqd*, secara bahasa *Al-‘aqd* bentuk masdarnya *‘aqada* dan jamaknya adalah *Al-‘ Uqud* yang berarti adalah perjanjian tercatat atau kontrak.³⁰

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., h. 88.

³⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2008), h. 213.

Istilah *Ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu kepada pertanyaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.³¹

Perkataan '*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama maka terjadilah perikatan dua buah janji ('*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebutkan perikatan ('*aqad*).

Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk mengikat diri. Jadi setiap pernyataan diungkapkan oleh pihak lain setelah ijab disebut qabil (pelaku qabul), tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu.³²

³¹Eka Nuraini Rahmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani,"Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol.XII, No. 04, 4 Desember, 2015), h.786

³²Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2 (Jakarta : Gaya Media Pertama, 2007), h. 98.

b. Dasar Hukum Akad

1) Q.S al-Maidah 5: 1

بِالْعُقُودِ أَوْفُواْ أَمْنُواْ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu." (QS. al-Maidah 5: 1)³³

2) Q.S. Al - Imran(3):76

الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنْ وَاتَّقَىٰ بَعْدَهُ أَوْفَىٰ مَنْ بَلَىٰ

Artinya: "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (QS. Al - Imran(3):76)³⁴

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Rukun akad adalah kata mufrad dari kata jamak "arkaa" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu.³⁵

Adapun Ulama Hanafiyah mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut, sedangkan menurut Jumhur

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., h. 156.

³⁴*Ibid.*, h. 88.

³⁵M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Cetakan Ke III(Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), h.300.

Ulama Fiqh, rukun adalah sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut.³⁶

Dengan demikian, yang dimaksud dengan rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan.³⁷

Adapun rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

a) *'Aqid*

'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang juga terdiri dari beberapa orang. Secara umum, *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

b) *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang diakadkan (objek akad). Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa menjadi objek akad, yaitu:

- (1) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad.
- (2) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'.

³⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta : Logos Publishing House, 1996), h. 264.

³⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Amzah, 2010, Cet Ke-1, h. 114.

- (3) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu pelaksanaan akad
- (4) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan diantara keduanya.

c) *Maudhu' al-'aqd*

Maudhu' al-'aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan akadnya.

d) *Sighat al-'aqd*

Sighat al-'aqd adalah ijab qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.³⁸

Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan dan menimbulkan kewajiban antara masing-masing pihak secara timbal balik.³⁹

³⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*...., h. 212.

³⁹H. A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Pres, 2008), h. 32.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al 'aqd* adalah:

- (1) *Shighat al 'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak makna.
- (2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Antara yang berijab dan yang menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “Aku terima benda ini sebagai pemberian”.
- (3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.⁴⁰

Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu :

- (1) Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- (2) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan,

⁴⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 53.

misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.

- (3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang.⁴¹

2) Syarat-Syarat Akad

Berdasarkan unsur yang telah di bahas diatas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*), syarat sah, syarat kelangsungan akad (syarat *nafadz*), dan syarat keharusan (syarat *luzum*).

a) Syarat *In'iqad* (terjadinya akad)

Syarat *in'iqad* adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat ini ada dua macam:

- (1) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini meliputi syarat dalam shighat, aqid, objek akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- (a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap

⁴¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*...., h. 51.

bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan, dan karena boros

(b) Yang dijadikan objek akad dapat menerimahukumnya.

(c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memilkibarang.

(d) Janganlah akad itu akad yang dilarangoehsyara', seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).

(e) Akad dapat memberikanfaedah.

(f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadikabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.

(g) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadibatal.⁴²

(2) Syarat khusus

Syarat khusus yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya seperti syarat saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad-akad kebendaan (hibah, gadai,

⁴²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h.55.

danlain-lain).

b) Syarat sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat- akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid, tetapi tetap sah dan eksis.⁴³

c) Syarat *nafadz* (kelangsunganakad)

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat, yaitu:

d) Syarat *Luzum*

Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat (*lazim*). Untuk mengikatnya (*lazim-nya*) suatu akad, seperti jual beli, disyaratkan tidak adanya kesempatan *khiyar* (pilihan), yang memungkinkan di *fasakh* nya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyar*, maka akad tersebut tidak mengikat (*lazim*) bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.⁴⁴

Menurut ulama Mazhab az- Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah adalah batal. Sedangkan menurut jumhur ulama fikih, selain Mazhab az- Zahiri, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai

⁴³Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2018), Cet. Ke-1, h. 6.

⁴⁴*Ibid*, h. 39.

kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan di dalam al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanbali dan Maliki.⁴⁵

d. Macam-macam Akad

Macam-macam akad adalah sebagai berikut:

1) 'Aqad munjiz

Yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

2) 'Aqad Mu'alaq

Ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

3) 'Aqad Mudhaf

Ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penaggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang

⁴⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), Cet Ke-2, h. 109.

pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.⁴⁶

Macam-macam akad dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti:

1) Menurut segi penamaanya, akad dibagi menjadi dua yaitu:

a) Akad bernama (*al-‘uqud al-musamma*)

Yaitu akad yang terdapat penamaannya dalam Al-Qur’an dan hadist serta telah dijelaskan hukumnya. Contohnya seperti jual beli, sewa-menyewa, kafalah, hibah, rahn, wakalah, dan lain-lain.

b) Akad yang tidak bernama (*al-‘uqud ghair al-musamma*)

Yaitu akad yang belum dinamai oleh syara’, sehingga penamaannya berdasarkan pada ‘urf, qiyas, dan malahah mursalah yang muncul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di sepanjang zaman dibidang muamalah. Akan tetapi, akhirnya menjadi bernama. Seperti contohnya murabahah, al-istishna, dan lain-lain.⁴⁷

2) Dilihat dari segi terpenuhinya rukun dan syarat, akad dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Akad *shahih*

⁴⁶Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), Cet ke-1, h. 10.

⁴⁷Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 52.

Yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

b) Akad *ghairu shahih*

Akad *ghairu shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad *ghairu shahih* ini menjadi dua macam, yaitu akad batil dan fasid.

Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau ada larangan lingsung dari syara'. Misalnya jual beli objek yang tidak jelas. Adapun akad fasid adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual.⁴⁸

3) Dilihat dari segi zatnya, akad dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Akad benda yang berwujud (*'ainiyah*)

Akad ini dianggap telah sah apabila benda atau objek akad tersebut telah diserahterimakan. Apabila benda atau objek

⁴⁸*Ibid*, h. 52.

belum terwujud, maka akad ini dianggap keabsahannya belum sempurna.

a. Akad benda yang tidak berwujud (*ghair al-ainiyyah*)

Akad ini dianggap sah setelah terjadinya shigat (ijab kabul) sekalipun objek akadnya belum diserahterimakan.⁴⁹

4) Dilihat dari tujuannya, akad dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Akad *tabarru*

Yaitu segala macam akad yang dimotivasi oleh aspek pertolongan atau kontrak yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan. Sebagai tujuan utamanya, akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Contohnya adalah *qard*, *wadi'ah*, *wakalah*, *rahn*, *hibah*, dan lain-lain.

b) Akad *tijarah*

Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. Contohnya adalah akad-akad bagi hasil berupa *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain sebagainya dan juga akad sewa menyewa berupa *ijarah* dan lain sebagainya.⁵⁰

c) Dilihat dari segi *luzum* dan dapat dibatalkannya, akad dibagi menjadi empat macam, yaitu:

⁴⁹*Ibid*, h.53.

⁵⁰*Ibid*, h. 54.

- a. Akad *lazim*, yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan, seperti akad perkawinan. Manfaat perkawinan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.
- b. Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dapat dirusakkan, seperti persetujuan jual beli.
- c. Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak, seperti rahn orang yang menggadai sesuatu benda mempunyai kebebasan kapan saja ia akan melepaskan rahn atau menebusnya kembali barangnya.
- d. Akad *lazimah* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.⁵¹

5) Dilihat dari segi kedudukannya akad dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad pokok (*al- 'aqad al-ashli*)

Yaitu akad yang berdiri sendiri dan keberadaannya tidak bergantung kepada suatu hal lain. Misalnya, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

⁵¹Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*..., h. 14.

b) Akad asesoir (*al- 'aqad at-tabi'i*)

Yaitu akad yang keberadannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung pada suatu hal lain yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya suatu akad tersebut. Misalnya penganggungan (*kafalah*) dan gadai (*rahn*).⁵²

e. Asas-Asas Akad

Ada tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu:

1) *Asasilahiah*

Kegiatan muamalah tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (*ketauhidan*). Dengan demikian, manusia memiliki tanggungjawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Ketika seorang manusia hendak bermuamalah (membeli dan menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah.⁵³

2) *Asas kebebasan (Al-Hurriyah)*

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan

⁵²Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 38.

⁵³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), Cet ke- 2, h. 92

persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.⁵⁴

3) Asas persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu, Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan.

Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

4) Asas keadilan (*Al- 'Adalah*)

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-qur'an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.⁵⁵

5) Asas Kerelaan (*Al-Ridha'iyah*)

Asas kerelaan adalah kalimat '*an taradhin minkum*, yang

⁵⁴*Ibid.*, h. 93.

⁵⁵*Ibid.*, h. 94.

berarti saling rela diantara kalian, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29:

﴿بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)⁵⁶

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing- masing pihak,tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.⁵⁷

6) Asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara parapihak.⁵⁸

7) Asas tertulis (*Al-Kitabah*)

Disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*...., h. 122.

⁵⁷Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), Cet ke- 1, h.

⁵⁸*Ibid.*, h. 102.

manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi- saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatantersebut.⁵⁹

f. Hikmah Akad

Diadakannya akad sesama manusia di dalam muamalah tentu memiliki hikmah, antara lain:

- 1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- 2) Tidak dapat sembarangan membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah ditentukan oleh syara'.
- 3) Akad merupakan 'payung hukum' di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

Menurut para ulama fiqh, setiap akad ini mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak miliki dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak- pihak yang

⁵⁹*Ibid.*, h.103.

berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal- hal yangdibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.⁶⁰

g. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir bila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir bila telah berpindahnya hak milik barang dari penjual kepada pembeli dan harga telah menjadi milik penjual.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa- menyewa dan pinjam- meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.⁶¹

Fasakh dapat terjadi dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) *Di-fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal- hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad

⁶⁰NasrunHoroen,*FiqhMuamalah*(Jakarta:GayaMediaPratama,2007),CetKe-2,h. 106.

⁶¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*(Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 70.

rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.

- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengancara ini disebut *iqalah*.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).⁶²
- 5) Pada akad *ghair lazim* yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti ada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain, atau yang gahir lazim pada satu pihak dan lazim pada pihak lainnya, seperti gadai. Orang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang

⁶²*Ibid*, h. 72.

yang menggadaikan barang. Pembatalan yakni ketika akad rusak, adanya khiyar.

- 6) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 7) Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- 8) Karena kematian.⁶³

2. Konsep Umum *Wadi'ah*

a. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah secara bahasa berarti titipan, meninggalkan atau kepercayaan.⁶⁴ Kata *wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antar manusia.

Barang titipan dalam bahasa fiqih dikenal dengan *al-wadi'ah*.

Menurut istilah *wadi'ah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wadi'a 'Inda Ghair Malikihi Layahfadzah*), berarti bahwa *al-wadi'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, "*awada'tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadi'ah*

⁶³*Ibid*, h.73.

⁶⁴Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Arab Indonesia Al-Ashri* (Yogyakarta:Multi Karya Grafika), h.207.

'Indi). Secara bahasa *al-wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*I'tiha'u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulihi*).⁶⁵

Demikian pula *wadi'ah* dapat didefinisikan sebagai arti lain yaitu pemberian suatu mandat/kepercayaan untuk dapat memelihara suatu barang lain atau barang yang khusus dimiliki oleh seseorang, dengan cara-cara tertentu pula. Oleh sebab itu, diizinkan agar menitipkan kulit bangkai yang sudah disucikan, ataupun seekor anjing yang sudah terlatih untuk dapat berburu ataupun dapat berjaga-jaga, tidak diperbolehkan menitipkan baju yang sedang terbang tertiuip angin, hal ini masuk ke dalam golongan harta barang mubazir (tidak ada suatu kekhususan agar dimiliki), yang bertolakbelakang dengan prinsip *wadi'ah*.⁶⁶

Secara *komulatif*, *wadi'ah* mempunyai dua arti, arti yang pertama yaitu pernyataan dari orang yang sudah memberi kuasa ataupun mewakili pihak lainnya agar dapat memelihara atau menjaga harta barang orang tersebut. Arti kedua yaitu suatu harta barang yang dititipi seseorang kepada pihak lainnya dengan maksud agar barang tersebut dapat dipelihara dan dijaga oleh orang yang dititipi.⁶⁷

⁶⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arabah* (Menara Kudus, 2008), h. 248.

⁶⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah....*, h. 173.

⁶⁷Ahmad hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 14.

Wadi'ah juga dapat dimaknai sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu, kelompok ataupun suatu badan hukum dengan maksud agar dapat dijaga, dipelihara sebagaimana semestinya dan dikembalikan lagi kapanpun penyimpan menghendaki keinginannya tersebut. Esensi dibuatnya perjanjian itu sendiri yaitu untuk menjaga dengan baik kemanan barang tersebut dari kerusakan, pencurian, dan kebutuhan lainnya. Arti kata “barang” disini yaitu sesuatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga, dan barang lainnya yang berharga menurut pandangan Islam.⁶⁸

b. Dasar Hukum Wadi'ah

Dasar hukum dibolehkannya akad *wadi'ah* adalah:

1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 283:

رَبُّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتْكُمْ أَمْنَتُهُ أَوْ تَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّبَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ

Artinya: ‘Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai tuhan nya.’ (Q.S Al-Baqarah:283)⁶⁹

⁶⁸Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Diatribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 20.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 60.

Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58:

لنَّاسٍ بَيْنَ حَكَمَتِهِ إِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ
بَصِيرًا سَمِعًا كَانَ اللَّهُ بِهِ عَظِيمًا نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ لَحَكْمًا أَنْ



Artinya; “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa : 58)⁷⁰

2) Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَ مَنَّكَ
وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Dari Abi hurairah r.a berkata: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR. At-Tirmidzi dan Abu Ddawud dan ia menghasankannya, dan hadis ini juga dishahihkan oleh Hakim)⁷¹

3) Ijma

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, para ulama fiqh bersepakat mengatakan bahwasannya hukum *wadi'ah* (titipan) boleh dan disunahkan dalam rangka saling tolong-menolong antar sesama. Dengan demikian, Ibnu Qudamah (541-620 H/1147-1223 M), pakar fiqh Hanbali, menyatakan bahwa sejak

⁷⁰Ibid., h. 128

⁷¹Ibni Hajar Al-‘asqolaanii, *Buluughu al-maraam*, h. 225.

masa Rasulullah SAW sampai dengan saat ini, akad *wadi'ah* telah menjadi *ijma' amali* (konsensus dalam praktek) untuk umat Islam dan tidak ada seorang ulama fiqh pun yang mengingkarinya.

Landasan dari *ijma* yakni kesepakatan ulama. Para ulama bersepakat tentang dibolehkannya *wadi'ah*, alasannya masyarakat membutuhkan akad *wadi'ah*.⁷² Adanya *wadi'ah* sangat membantu manusia agar saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. Di Indonesia, akad *wadi'ah* mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390.⁷³

c. Rukun dan Syarat Wadi'ah

1) Rukun Wadi'ah

Menurut Hanafiyah rukun *al-wadi'ah* ada satu, yakni *ijab* dan *qabul*, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun.⁷³ Menurut Hanafiyah dalam *shigat ijab* dianggap sah jika *ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) ataupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk *qabul*, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipkan barang ialah *mukalaf*, tidak

⁷²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama), h. 246.

⁷³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., h. 246.

sah apabila yang menitipkan dan yang menerima barang titipan ialah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).⁷⁴

Mayoritas para ulama berpendapat sebagaimana kalangan Syafi'iyah, jika rukun *wadi'ah* ada empat, yakni pihak-pihak yang berakad, barang yang dititipi, *ijab* dan *qabul*. Pihak yang menitipkan dan menerima titipan harus orang yang cakap hukum. Berkaitan dengan syarat *sighat*, penerimaan atau kabul dapat berupa jawaban atau isyarat dengandiam.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 370 menyebutkan rukun *wadi'ah* adalah:

1. *Muwaddi* (penitip)
2. *Mustauda'* (penerima titipan)
3. *Wadi'ah bih* (harta titipan)
4. *Sighat* (perjanjian)⁷⁵

2) Syarat-Syarat *Wadi'ah*

Syarat-syarat *wadi'ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat *shighat*, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

a) Syarat - syarat orang yang menitipkan

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut:

⁷⁴*Ibid.*, h. 251.

⁷⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid V (Jakarta: Replubika Penerbit, 2018), h. 168.

- (1) Berakal. Dengan demikian, tidak sah *wadi'ah* yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum berakal.
- (2) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah, baligh tidak termasuk syarat *wadi'ah*, sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* asal dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa Malikiyah memandang *wadi'ah* sebagai salah satu jenis *wakalah*, hanya khusus dalam menjaga harta. Dalam kaitan dengan syarat orang yang menitipkan sama dengan orang yang mewakilkan, yaitu:

- (1) Baligh
- (2) Berakal, dan
- (3) Cerdas

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap *wadi'ah* hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.

b) Syarat-syarat orang yang dititipi

Syarat-syarat orang yang dititipi adalah sebagai berikut:

- (1) Tidak sah wadi'ah dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal dan anak yang masih dibawah umur tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- (2) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, hanagiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan ia sudah mumayyiz.
- (3) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus diduga kuat mampu menjaga barang dan harta yang dititipi kepadanya.⁷⁶

c) Syarat-syarat Sighat

Shighat adalah ijab dan qabul. Syarat *shighat* adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas dan adakalanya dengan sindiran. Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan sindiran harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang tegas: “*Saya titipkan barang ini kepada Anda.*” Sedangkan contoh lafal sindiranseseorang mengatakan: “*Saya berikan mobil ini*

⁷⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*..., h. 461.

kepada Anda.” Kata “berikan” mengandung arti hibah dan *wadi'ah*(titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “*titipan*”. Contoh *ijab* dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*). Demikian pula *qabul* kadang-kadang dengan lafal yang tegas, seperti: “*Saya terima*” dan adakalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.⁷⁷

d) Syarat-syarat benda yang dititipi

Syarat benda yang dititipi adalah sebagai berikut:

(1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda yang dititipkan adalah benda yang tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah, sehingga apabila benda tersebut hilang maka penerima titipan tidak berkewajiban untuk menggantinya. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah.

(2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai mal walaupun najis, seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau

⁷⁷Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah....*, h. 258.

menjaga kemanan. Apabila benda yang dititipkan tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.⁷⁸

d. Macam-Macam *Wadi'ah*

Secara umum, terdapat dua jenis *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad ad-dhamanah*.

1) *Wadi'ah yad al – amanah*

Wadi'ah yad al-amanah ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta atau barang titipan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperbolehkan membebankan biaya kepada yang menitipkan.

2) *Wadi'ah yad ad-dhamanah*

Wadi'ah yad ad-dhamanah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*....., h. 468.

- b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta tersebut tentu menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.
- c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini.⁷⁹

e. Kewajiban Menerima *Wadi'ah*

Pihak yang menerima titipan memiliki kewajiban yang terikat agar menjaga barang titipan. Kewajiban ini juga mengikat dan dibebankan kepada pihak keluarga penerima titipan, artinya mereka mempunyai kewajiban juga menjaga barang tersebut.⁸⁰

Menurut Imam Syafi'i yang berkewajiban menjaga barang tersebut hanya penerima titipan. Imam al-Nawawi menerangkan bahwa orang yang menerima titipan dia wajib menjaganya, diharamkan menerima titipan jika seseorang tidak mampu menjaga barang titipan tersebut.⁸¹ Sementara orang yang mampu menjaga barang titipan baginya dianjurkan untuk menerimanya. Jika tidak ada yang mampu menerima beban tersebut, maka diwajibkan bagi yang sanggup dan dapat menerimanya saja.

Tanggung jawab menyimpan *wadi'ah* ialah amanah. Syarat *wadi'ah* diantaranya sebagai berikut:

⁷⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*..., h. 284.

⁸⁰Sulaiman Rasyid, *Fikih Muamalah*..., h. 315.

⁸¹Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Raudatul Talibin*...,II/429; Yahya bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu'*...,XIV/74

- 1) Diasingkan dari barang- barang milik orang lain, yaitu tidak dicampur antara barang yang disimpan supaya dapat diketahui mana diantaranya milik orang-orang tertentu.
- 2) Tidak digunakan
- 3) Tidak dikenakan upah bagi penjaganya

Pemilik barang boleh mengenakan syarat tertentu berkaitan dengan keselamatan barang *wadi'ah* nya. Sekiranya yang punya barang ghaib, hilang, atau tidak dapat diketahui dimana berada, masih hidup atau sudah meninggal, maka simpanan *wadi'ah* itu diteruskan hingga ternyata pemilik barang masih hidup atau sudah meninggal. Apabila ternyata kematiannya maka barang itu hendaklah diserahkan kepada waris untuk dibagikan mengikuti aturan.⁸²

Apabila *wadi'ah* yang dijaga sebagaimana dijelaskan di atas hilang, rusak atau musnah bukan karena kelalaian orang yang menyimpan, maka ia tidak diwajibkan mengganti. Namun, apabila tidak dijaga sebagaimana mestinya maka hal keadaan tanggung jawab menyimpannya berubah dari amanah kepada *dammah* yang bermakna ia wajib diganti apabila hilang, rusak atau musnah.⁸³

Sekiranya ia membuat perjanjian *wadi'ah* dengan orang lain dengan izin maka hendaklah tanggung jawab menyimpan yang pertama kepada orang yang menyimpan yang kedua. Jika orang

⁸²Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansari, *Asna al-Matalib* (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), XIV/81.

⁸³*Ibid.*

yang menyimpannya meninggal dunia maka berpindahlah tanggung jawab *wadi'ah* itu kepada ahli waris sehingga selesai barang itu diserahkan kembali kepada yang punya. Semua pembelanjaan atas barang *wadi'ah* seperti makan dan minum, jika *wadi'ah* itu dari jenis binatang adalah ditanggung oleh yang punya *wadi'ah*. Akan tetapi, jika orang yang menyimpan menggunakan *wadi'ah* itu untuk kepentingannya maka pembelanjaan itu ditanggung olehnya. Orang yang menyimpan tidak boleh membuat perjanjian *wadi'ah* dengan orang lain atas barang yang disimpan tanpa izin dari punya barang.⁸⁴

f. Cara Menjaga Barang Titipan

Para ulama berbeda pendapat tentang menjaga barang titipan. Para ulama Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa orang yang dititipi hendaknya menjaga titipan itu sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri, yaitu dia menjaganya di tempat yang kualitas penjagaannya sama dengan ketika dia menjaga barang-barangnya sendiri.

Menurut para ulama Mazhab Hanafi, orang yang dititipi boleh juga menjaga titipan dengan bantuan orang lain yang bukan menjadi tanggungannya, tapi biasanya orang itu menjaga harta orang yang dititipi itu ditempatnya.

Para ulama Mazhab Maliki berkata bahwa orang yang dititipi

⁸⁴Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cetakan Ke1 (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h.186.

boleh menjaga barang titipan di tempat orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak dan orang yang dia sewa yang telah terbiasa menjaga hartanya di tempat mereka, yaitu mereka pernah tinggal lama di tempatnya dan dia percaya kepada mereka berdasarkan pengalamannya dengan mereka. Berbeda jika orang-orang tersebut tidak terbiasa untuk menjaga hartanya, seperti istri yang baru dia nikahi.

Para ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa orang dititipi harus menjaga sendiri titipan yang ada pada dirinya. Dia tidak boleh menjaganya di tempat istri atau anaknya tanpa seizin orang yang titip kepadanya, atau jika tanpa uzur. Hal ini karena orang yang titip menginginkan penjagaan terhadap barangnya dari orang yang dia titipi, bukan dari orang lain. Jika orang yang dititipi menyalahi cara penjagaan yang diinginkan pemilik barang, maka dia harus menjamin ganti titipan itu, kecuali jika ada uzur seperti sakit atau dia melakukan perjalanan, maka ia tidak wajib menggantinya.⁸⁵

Hukum menerima atau menjaga barang titipan adalah sebagai berikut:

- 1) *Wajib*, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan

⁸⁵Wahbah Az Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5* (Jakarta:Gema Insani, 2011), 561.

menjaga benda-benda tersebut, sementara tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-bendatersebut.

- 2) *Sunnah*, bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga titipan yang diserahkan kepadanya. Memang menerima titipan adalah sebagian dari tolong menolong yang dianjurkan oleh agamaIslam.
- 3) *Haram*, apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaganya sebagaimana mestinya, karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkanitu.
- 4) *Makruh*, yaitu bagi orang yang dapat menjaganya, tetapi ia tidak percaya kepada dirinya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima bend-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadapyang menitipkan dengan cara merusak benda atau harta yang dititpkan kepadanya.⁸⁶

Ibnu Juzzay dari Mazhab Maliki menyebutkan sejumlah hukum cabang dalam akad *wadi'ah*.Hukum-hukum tersebut sebagai berikut:

- a) Memperjualbelikan barang titipan

⁸⁶H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*(Bandung: Sinar Baru Algensindo,2009)., h. 330.

Barang siapa memperjualbelikan barang titipan yang ada padanya, maka keuntungan yang diperolehnya adalah halal baginya. Sedangkan Abu Hanifah berkata, “keuntungan itu adalah sedekah.” Dan sejumlah ulama mengatakan, “keuntungan itu adalah untuk pemilik barang.”

b) Meminjamkan barang titipan

Barang siapa meminjamkan titipan, jika titipan itu adalah benda, maka itu dimakruhkan. Jika titipan tersebut adalah barang dagangan, maka tidak boleh dipinjamkan.

c) Perselisihan tentang barang titipan

Jika pemilik meminta barangnya kepada orang yang dititipi, namun orang yang dititipi mengatakan bahwa titipan itu rusak atau hilang, yang diterima adalah perkataan orang yang dititipi yang disertai dengan sumpahnya. Demikian juga jika dia mengatakan bahwa dia telah mengembalikannya. Kecuali jika dia menerima titipan dengan adanya bukti, maka perkataannya bahwa dia telah mengembalikannya tidak diterima kecuali dengan adanya bukti juga. Ibnu al-Qasim, Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berkata, “Yang diterima adalah perkataan orang yang dititipi, walaupun ketika dia menerima titipan itu terdapat bukti.”⁸⁷

g. Kondisi yang Membuat Titipan Harus Dijamin Gantinya

Barang atau harta yang titipan berubah dari yang sekedar

⁸⁷*Ibid.*, h. 571.

amanah menjadi harus diganti disebabkan karena beberapa kondisi berikut ini:

1) Orang yang dititipi tidak menjaga barangtitipan.

Dengan adanya akad, orang yang dititipi harus menjaga barang titipan itu. Sehingga jika dia membiarkannya tanpa penjagaan sampai barang itu rusak, maka dia harus menggantinya dengan cara memberikan jaminan akan menggantinya.

2) Orang yang dititipi menitipkan lagi barang titipan kepada orang lain

Apabila orang yang dititipi mengeluarkan benda atau barang titipan dari penjagaannya dan dia menitipkannya kepada orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya, maka orang yang menerima titipan tersebut harus menjamin gantinya.⁸⁸

3) Menggunakan barang titipan

Jika orang yang dititipi mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya, seperti menunggangi tunggangan atau memakai pakaian yang dititipkan kepadanya, maka dia pun harus menjamin gantinya. Namun jika dia tidak mengambil manfaat sama sekali dari benda yang dititipkan kepadanya. Jumhur ulama berpendapat:

a) Jumhur ulama Mazhab Hanafi mengatakan “sebagaimana

⁸⁸Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 507.

kita ketahui dari kaidah mereka bahwa dia tidak wajib menjamingantinya. Karena, dia menjababendayang dititipkan kepadanya atas izin pemiliknya, sehingga titipan itu seperti ketika belum dipakai.

- b) Para ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berkata, "Jika benda yang dititipkan rusak setelah dia pakai, maka dia harus menggantinya walaupun kerusakan itu disebabkan karena sebab lain. Karena dengan adanya pelanggaran dariny ayat penggunaannya, maka status *wadi'ah* menjadi hilang dan sifatnya sebagai amanah pun batal. Sehingga kondisinya adalah seperti dia mengingkari adanya titipan itu kemudian mengakuinya. Dengan demikian, tanggung jawabnya untuk memberi ganti tidak hilang kecuali dengan mengembalikan titipan itu kepada si pemiliknya sebagaimana telah ditetapkan."⁸⁹

4) Berpergian membawa barang titipan

Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang dititipi boleh bepergian dengan membawa benda yang dititipkan kepadanya jika jalan yang ditempuhnya aman dan tidak dilarang oleh pemilik barang tersebut yaitu ketika akad *wadi'ah* itu bersifat mutlak. Karena perintah untuk menjaga barang titipan adalah mutlak tanpa adanya pembatasan tempat,

⁸⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5* (Jakarta:Gema Insani, 2011), h. 565.

sehingga tidak boleh ada pembatasan dengan dalil. Berdasarkan dengan hal ini, jika orang yang dititipi bepergian membawa barang titipan, lalu barangnya rusak atau hilang, maka dia tidak wajib menggantinya.

Para ulama Mazhab Maliki berkata bahwa orang yang dititipi tidak boleh membawa barang titipan jika bepergian, kecuali jika barang itu dititipkan kepadanya ketika dia sedang dalam perjalanan. Dengan demikian, jika orang yang dititipi ingin bepergian maka hendaknya dia menitipkannya kepada orang yang dapat dipercaya dari penduduk setempat. Dan dia pun tidak wajib menjamin ganti bagi titipan itu, baik dia mampu menyerahkannya kepada penguasa muslim maupun tidak.

Para ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali berkata bahwa orang yang mendapatkan barang titipan tidak boleh membawanya jika bepergian. Jika dia ingin bepergian, maka dia harus menyerahkannya kepada pemiliknya atau wakilnya, jika dia mampu melakukannya. Jika dia tidak mampu melakukannya, misalnya karena dia tidak menemukan pemiliknya, maka dia harus menyerahkannya kepada penguasa. Kerena orang yang mendapat titipan adalah orang yang secara sukarela menjaga titipan yang ada padanya, sehingga dia tidak wajib untuk terus menerus menjaganya. Dan penguasa

menempati posisi pemilik titipan tersebut ketika pemiliknya tidak ada.⁹⁰

5) Pengingkaran terhadap adanya titipan

Jika pemilik barang meminta kembali barangnya dari orang yang dia titipi, namun orang itu mengingkari adanya titipan, atau dia bersih keras untuk tetap membawa barang tersebut sedangkan dia mampu untuk menyerahkan, maka dia harus menjamin gantinya. Hal ini karena ketika pemilik telah memintanya untuk mengembalikan titipan itu, berarti dia telah melepaskannya dari penjagaan terhadap barangnya. Sehingga setelah itu, statusnya dalam memegang barang itu adalah sebagai orang yang merampas dan menghalangi pemiliknya untuk mengambilnya. Oleh karena itu, dia harus menggantinya jika pemiliknya mendatangkan bukti tentang adanya titipan itu, atau dia tidak mau bersumpah, atau juga jika dia mengakui adanya titipan itu. Jika orang yang dititipi awalnya mengingkari adanya titipan itu, kemudian dia mengakuinya, maka dia tetap wajib menjamin gantinya karena akad *wadi'ah* telah hilang sebelumnya.⁹¹

6) Percampuran barang titipan dengan barang lain

Jika orang yang dititipi mencampur barang titipan dengan barang miliknya, apabila keduanya dipisahkan dan dibedakan, maka dia tidak memiliki tanggungan apapun. Sedangkan apabila

⁹⁰*Ibid*, h. 566.

⁹¹*Ibid.*, h. 568.

keduanya tidak bisa dibedakan, maka para Ulama sepakat bahwa orang yang dititipi harus menjamin gantinya.⁹²

- 7) Terjadinya pelanggaran dari orang yang dititipi terhadap syarat yang ditetapkan oleh pemilik barang titipan.

Jika pemilik barang tersebut mensyaratkan kepada orang yang menerima barang titipan untuk menjaga barangnya di tempat tertentu, seperti di dalam rumah, kotak, atau sebagainya. Kemudian orang yang dititipi memindahkan barang tersebut dan tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh pemiliknya, maka para ulama berpendapat, menurut ulama Mahzab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi berpendapat apabila orang yang menerima titipan memindahkan barang titipan tersebut ke tempat yang kualitasnya sama atau lebih baik daripada yang disarankan oleh pemilik barang, maka dia tidak harus menggantinya. Sedangkan menurut Mahzab Hambali pihak penerima barang titipan tersebut harus menjamin gantinya meskipun dipindahkan ke tempat yang lebih baik.⁹³

h. Berakhirnya Akad Wadi'ah

Akad wadi'ah akan berakhir dengan beberapa hal seperti berikut ini:

- 1) Barang atau harta yang dititipi diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemilik barang mengambil barang yang dia titipkan atau orang yang dititipi menyerahkannya

⁹²Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*...., h. 509.

⁹³*Ibid.*, h. 510.

kepada pemiliknya, maka akad wadi'ah akan berakhir. Karena akad wadi'ah adalah akad tidak mengikat yang berakhir dengan diambilnya barang titipan oleh pemiliknya, atau diserahkan oleh orang yang dititipi kepada pemiliknya.

- 2) Kematian orang yang titip atau orang yang dititipi. Akad wadi'ah ini berakhir dengan kematian salah satu pihak pelaku akad, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.
- 3) Gila atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad wadi'ah karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan harta.
- 4) Orang yang titip dilarang membelanjakan harta karena kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta karena bangkrut. Hal ini adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan keduanya.
- 5) Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad wadi'ah ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah, maupun lainnya.⁹⁴

B. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri peneliti, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang konkrit yang membahas

⁹⁴*Ibid.*, h. 572.

atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh peneliti. Terkait hal kasus yang diteliti oleh peneliti, maka peneliti mengambil beberapa sumber yang berkaitan dengan penitipan (*wadi'ah*) sebagai berikut:

Pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Enila Sari tahun 2019 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum islam tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor pada Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratu Prawinaga Hajimena Lampung Selatan”. Hasil penelitian ini adalah adanya penambahan biaya secara sepihak bagi penitip motor yang menginap tanpa ada kesepakatan di awal akad, sehingga penitip motor merasa dirugikan karena mereka tidak mengetahui hal tersebut dari awal pelaksanaan akad.⁹⁵

Kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Cici Andriani tahun 2017 dengan judul penelitian ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Jasa Penitipan Padi pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan’. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemilik pabrik membebankan biaya kepada petani yang menitipkan padinya dan menjanjikan bonus diawal kepada petani.⁹⁶

Ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Anugrah M Zakaria tahun 2017 dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Penyimpanan Padi di Lumbung Desa Sumbergandu Kecamatan

⁹⁵ Enila Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad upah Jasa Penitipan Motor (Studi Kasus pada Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah ratu Prawinaga Hajimena Lampung Selatan)”, (*Skripsi* Program Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2019).

⁹⁶ Cici Nadriani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Jasa Penitipan Padi (studi Kasus pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan)”, (*Skripsi* Program Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Pilangkenceng Kabupaten Madiun”. Hasil penelitian ini adalah adanya aturan tambahan yang tidak tertulis di akad awal perjanjian yaitu pengalihan kepemilikan padi dari petani ke pengelola ketika dalam kurun waktu setahun diambil.⁹⁷

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi dan permasalahan yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu permasalahan Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jasa Penitipan Helm pada Simpur Center Bandar Lampung sangat menarik dan layak untuk diteliti.



⁹⁷ Anugrah M Zakaria, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Penyimpanan Padi di Lumbung Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun” (*Skripsi* Program Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qu'an dan Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
Semarang: Kumudasmoro, 1994.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,
Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Ibni Hajar Al-'asqolaanii, *Buluughu al-maraam*, Jakarta: Daarul kutub al-islamiyah, 2002.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Ash-Shawai, Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq. 2004.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

Ibrahim, *Penerapan Fikih*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.

Intan Cahyani, Andi, *Fiqh Muamalah*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Jafri, Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Pres, 2008.

Sa'diyah, Mahmudatus, *Fikih Muamalah*, Jawa Tengah: Usnimu Press, 2018.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Replubika Penerbit, 2018.

Sahrani, Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sahroni, Oni, Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Sohari Ruf'ah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Buku

- A.Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 2011.
- Ahmad Az-Zarqa, Mushtafa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al- 'Am* (Dar Al-Fikr, Beirut, Tt Bakti, 2017.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Cet. I, Jakarta: Robani Press, 1977.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamlalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Amir, Dja'far, *Ilmu Fiqih*, Solo: Ramadhani, 1991.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineke Cipta, 2006.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2009
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dib Al-Bugha, Musthafa, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Damaskus: Darul Musthafa, 2009.
- Hakim, Lukman *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, Bandung: Erlangga, 2012.
- Hasan Ridwan, Ahmad, *BMT & Bank Islam Instrument Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- K. Lubis, Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Sosial Mandar Maju, 1996.

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mudjab Mahalli, Ahmad, Ahmad Rodli Hasbulla, *Hadist-Hadits-Hadits Mutlak 'Allah*, Jakarta: Pranada Media, 2004.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2017.

Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika: 2004.

Prastyo, Yoyok, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: ALFABETA, 2018.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus* (Jakarta: Prena Damedia Group, 2004.

Wahab Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Diatribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2005.

Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Jakarta: Kencana, 2018.

Yusuf Qardhawi, Muhammad, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2003.

Jurnal

Nuraini Rahmawati, Eka, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 04. 4 Desember, 2015.

Wawancara

Amir, (*Petuga Penitipan Helm*), Wawancara dengan Penulis, Simpung Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Shinta, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpung Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Nazilah, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpura Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Wahyu, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpura Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Juli, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpura Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Nia, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpura Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Adel, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpura Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Tama, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpura Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Fiki, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpura Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Fitri, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpura Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Salwa, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpura Center, Tanggal 14 Mei 2020.

